

Media Online	Radarkudus.jawapos.com
Tanggal	02 Desember 2024
Wilayah	Kabupaten Rembang



## **BPK Soroti Ketidaksesuaian APBD Rembang, Pemkab Ambil Langkah Ini Antisipasi Defisit Tahun 2025**

<https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695376742/bpk-soroti-ketidaksesuaian-apbd-rembang-pemkab-ambil-langkah-ini-antisipasi-defisit-tahun-2025>

REMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti ketidaksesuaian asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang tahun 2024.

Temuan ini mencatat adanya perbedaan signifikan antara target dan realisasi, yang berujung pada defisit anggaran.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, SILPA yang sebelumnya direncanakan mencapai Rp 66 miliar ternyata hanya terealisasi sebesar Rp 19 miliar.

Selisih sekitar Rp 47 miliar ini menjadi salah satu faktor utama defisit APBD Rembang.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan oleh tidak tercapainya beberapa sumber pendapatan yang telah direncanakan.

Salah satunya adalah pendapatan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang ditargetkan Rp 12 miliar tetapi hanya mencapai Rp 6 miliar.

“Pendapatan dari TPI yang ditetapkan sebesar Rp 12 miliar hanya terealisasi separuhnya. Hal ini tentunya memengaruhi pendapatan secara keseluruhan,” kata Hafidz.

Tak hanya itu, target retribusi daerah juga jauh dari harapan. Dari rencana Rp 32 miliar, hingga kini baru terealisasi kurang dari Rp 16 miliar.

“Hingga saat ini, retribusi belum mencapai 50 persen dari target. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami,” tambahnya.

Untuk APBD 2025, Pemkab Rembang menyusun rancangan yang lebih realistis melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).

Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,009 triliun, dengan belanja Rp 2,014 triliun.

Defisit sebesar Rp 5 miliar akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SILPA.

BPK mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh agar perencanaan keuangan daerah lebih akurat dan sesuai dengan potensi yang ada.

Hafidz pun menyatakan komitmennya untuk menjadikan evaluasi ini sebagai pedoman bersama dengan DPRD.

“Ini adalah pelajaran bagi kami. Ke depan, kami bersama DPRD akan memastikan keputusan yang diambil lebih matang dan sesuai dengan realitas pendapatan daerah,” jelas Hafidz.

Temuan BPK ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola keuangan Pemkab Rembang, sehingga defisit tidak lagi menjadi persoalan yang berulang. (vah/khim)